

**MELAMPAUI DEMOKRASI:
EKSPERIMENTASI PEMIKIRAN POLITIK
A. MUHAIMIN ISKANDAR**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Filsafat Islam (S.Fil.I)**

OLEH:

**ABU HANIFAH
NIM: 01510693**

**JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

SURAT PERNYATAAN

Nama : Abu Hanifah
Tempat Tanggal Lahir: Probolinggo, 27 November 1981
NIM : 01510693
Jurusan/ Prodi : Aqidah dan Filsafat.
Fakultas : Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Alamat asal : Desa Sumber Dawe RT 09 RW 02 Kecamatan Maron
Kabupaten Probolinggo Jawa Timur.
Cp : 081227288531
Judul skripsi : **MELAMPAUI DEMOKRASI: EKSPERIMENTASI
PEMIKIRAN POLITIK A. MUHAIMIN
ISKANDAR.**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Apabila kemudian hari diketahui bahwa karya tersebut bukan karya tulis ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta 29 Januari 2009.


Abu Hanifah

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yogyakarta, 16 Januari 2009

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Abu Hanifah
NIM : 01510693
Jurusan : Aqidah dan Filsafat
Judul skripsi : **MELAMPAUI DEMOKRASI: EKSPERIMENTASI
PEMIKIRAN POLITIK A. MUHAIMIN ISKANDAR**

Maka selaku pembimbing/pembantu pembimbing kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak di ajukan untuk di munaqosyahkan.

Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I

H. Shoffvullah Mz. M.Ag.
NIP. 150299964

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yogyakarta, 14 Januari 2009

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Abu Hanifah
NIM : 01510693
Jurusan : Aqidah dan Filsafat
Judul skripsi : **MELAMPAUI DEMOKRASI: EKSPERIMENTASI
PEMIKIRAN POLITIK A. MUHAIMIN ISKANDAR**

Maka selaku pembimbing/ pembantu pembimbing kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak di ajukan untuk di munaqosyahkan.

Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembantu Pembimbing II



Dr. Munawar Ahmad, M. Si
NIP. 105321646



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN
Jl. Marsda Adisucipto Telepon/Fax (0274) 512156 Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-07/R0

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DU/PP.00.9/15/2009

Skripsi dengan judul: *Melampaui Demokrasi: Eksperimentasi Pemikiran Politik A. Muhaimin Iskandar.*

Diajukan oleh :

Nama : Abu Hanifah
NIM : 01510693
Program Serjana Strata 1 Jurusan : AF

Telah di munaqosyahkan pada : Hari Kamis, Tanggal 29 Januari 2009 dengan nilai : 95 (A) dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Serjana Strata Satu.

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

H. Shofiyullah, Mz, M. Ag
NIP: 150 299 964

Penguji I

Dr. Alim Roswanto, M. Ag
NIP :150 280 262

Penguji II

Fahrudin Faiz, S.Ag., M.Ag.
NIP : 150 298 986

Yogyakarta, 29 Januari 2009
Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Dekan




Ayu Aryani, M. Ag
NIP: 150 232 692

MOTTO

Lawan Imperialisme...!

***Tetaplah berkukuh pada azas
Sebab tanpanya
Segala-gala tak lebih dari sekedar penjagalan
Atas nama apapun...!***

PERSEMBAHAN



*Teruntuk:
M. Ma'shum Masri Ayahanda sekaligus guruku
dan Ibunda Tersayang Muryatun 'Utsqo
Kak Mahfudz Ma'shum, S.Sos.I
Serta My North Star*

*Kalianlah yang mengajariku
Bahwa hidup
Tak sekedar kalah - menang
Demi kalian,
Aku rela terbakar api neraka..!*

ABSTRAK

Seabad kebangkitan bangsa ternyata belum bisa mengantarkan rakyat Indonesia menuju pangkalan pendaratan sebagaimana diidealkan. Krisis multidimensi yang mendera republik ini masih belum menemukan jalan keluarnya. Kehidupan berbangsa dan bernegara belum bisa melahirkan suatu proses akumulasi kebangsaan diberbagai sektor kehidupan. Sepuluh tahun yang lalu reformasi politik digulirkan oleh berbagai komponen bangsa dengan demokratisasi sebagai agenda utamanya guna mencapai tatanan kehidupan yang lebih terbuka, adil, dan sejahtera. Akan tetapi, proses liberalisasi politik tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Demokrasi justru menyandera tujuan luhur bangsa ini melalui berbagai tata nilai dan prosedur-prosedur yang bersifat aksesoris dan karikatif.

Muhaimin Iskandar, sebagai intelektual dan pelaku politik, mencoba menawarkan sebuah jalan baru bagi tercapainya cita-cita kolektif bangsa. Keprihatinan mendalam Muhaimin atas kondisi objektif bangsa mendorongnya untuk merefleksikan dengan serius problematika kebangsaan seraya melakukan ikhtiar politik yang terekspresikan dalam bentuk pemikiran politiknya. Penulis ingin mengetahui lebih utuh dan mendalam tentang gugusan pemikiran politik Muhaimin terutama terkait dengan cita-cita kebangkitan bangsa, melampaui demokrasi dengan menjadikan demokrasi sebagai instrumen bukan sebagai tujuan, berikut gagasan politiknya yang terkait. Berangkat dari cara pandang tersebut penulis mencoba melakukan elaborasi terhadap gagasan politik Muhaimin.

Dalam melakukan kajian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data utama melalui riset perpustakaan (*library research*) teknik pengumpulan data diperoleh dari dan melalui data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis deskriptif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa gagasan kunci Muhaimin Iskandar adalah cita-cita kebangkitan bangsa. Indonesia harus mampu bangkit dari keterpurukan diberbagai sektor kehidupan. Di level internasional, mengandaikan Indonesia mempelopori dan memimpin kebangkitan negara-negara Islam dan dunia ketiga, dalam rangka memupus ketergantungan dan intervensi dari Negara maju. Di level nasional, Muhaimin mendorong kebangkitan bangsa dengan strategi menjadikan demokrasi sebagai instrumen (*wasilah*), bukan sebagai tujuan. Praktek demokrasi formal-prosedural yang selama ini berjalan di Indonesia justru menciderai cita-cita kolektif bangsa. Disinilah kekuatan gagasan politik Muhaimin sebagai peretas kebuntuan demokrasi. Realisasi atas gagasan politik ini meniscayakan perangkat operasional, yaitu kepemimpinan yang visioner dan kuat dan adanya ideologi yang berpihak. Untuk menjamin cita-cita nasional tidak mengalami disorientasi dan degradasi, Muhaimin menawarkan pola kepemimpinan dalam bentuk sentralisme demokratik. Akan tetapi pada saat yang sama Muhaimin menempatkan terjaminnya pluralitas bangsa sebagai landasan pokok dari gugusan pemikirannya.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada kehadiran Allah SWT, Dzat Penguasa segala-gala, Dzat yang menjadikan sang waktu sebagai variable sosial paling misterius dalam sejarah peradaban umat manusia sehingga siklus hegemoni itu tetap terjaga dan tidak ada keunggulan abadi dari satu atas yang selebihnya. Entah itu bernama pribadi, ideologi, agama ataupun yang lainnya. Salam takdzim kami haturkan kepada Muhammad SAW, Sang Nabi Penakluk Imperium Romawi dan Persia sehingga ajaran-ajaranmu mengimbak-imbak berpendaran megah keseluruh jagad raya.

Perjalanan panjang ini akhirnya sampai juga mengantarkan penulis ke penghujung studi. Sebuah fase yang tidak mudah dalam kehidupan penulis selama bernaung di bawah atap UIN Sunan Kalijaga dari tahun 2001 hingga 2009. Fase yang penuh dengan gemuruh heroisme, romantika, persekawanan dan pengkhianatan sekaligus, dan sejumpat pemberontakan ala mahasiswa. Semua ini tentunya adalah sebuah proses yang tidak berdiri sendiri, tetapi melibatkan banyak pihak.

Karenanya pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati dan segenap ketulusan jiwa, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu:

1. Ibu Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Sudin, M.Hum dan Bapak Fahrudin Faiz, S.Ag, M. Ag. Selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Aqidah dan Filsafat Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Shofiyullah Mz, M.Ag, dan Dr. Munawar Ahmad, M.Si. yang telah membimbing dan memberi arahan serta saran yang sangat berharga dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Basir Solissa, MA. Selaku Pembantu Dekan III yang tiada lelah memberikan dorongan dan motivasi untuk segera menyelesaikan tanggung jawab akademik ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin yang telah bekerja keras mendidik dan mengajarkan semuanya kepada penulis.
6. Bapak pimpinan Tata Usaha beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada semua kebutuhan penulis.
7. Kepada ayahanda-ibunda tercinta (M. Ma'shum, Ms dan Muryatun 'Utsqo), serta kakakku (Machfudz Ma'shum, S. Sos.I), Segenap ketulusan, cinta, kesabaran, dan pengorbanan yang telah kalian berikan semoga menjadi spirit abadi untuk menjalani hidup yang lebih bermakna dan lebih baik. Karena kalianlah diri masih sanggup berdiri tegak dan bertahan di garis ini, kalianlah yang telah mengajarkan semua-muanya. Hormat dan takdzimku untuk kalian semua. Teruntuk Bunda, akhirnya putramu berniat lulus juga! Tak perlu lagi Bunda ngomel tiap waktu.

8. Dan teruntuk *My North Star*, perempuan yang berkeras hati untuk menemani hari-hariku. Kepadamu aku tak janjikan apapun selain hari-hari yang sulit namun khidmat. Yang pasti aku telah ucapkan ikrar itu..!
9. Kepada seluruh kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jogjakarta, ketulusan dan cinta kalian telah memberikan warna perjalanan ini penuh pesona dan harapan. Kebersamaan yang penuh arti dalam sebuah proses dialektika kreatif, marah, duka, dan keluh kesah adalah sebuah kebersamaan dan proses saling memberi arti yang mendalam. Kalian semua adalah saudara dan sahabat terbaik, semoga kebersamaan kita abadi dalam perjuangan menuju kedaulatan Nusantara atas tanah, air, udara, dan rakyatnya terima kasih kawan, jika bukan karena kalian mungkin aku telah lama terpuruk dalam dunia 'orang biasa'.
10. Kepada sahabat Misbahul Munir (Ketua BEM-F Ushuluddin), kuucapkan khusus untukmu terima kasihku yang mendalam atas kerjasamanya yang menyenangkan selama ini. Tidak setiap hal itu politis, sebab diatas politik ada ketulusan dan pengabdian. Thanks berat, Nir! Juga buat sahabat Ubed yang tak pernah lelah mengingatkan dan membantu segala tetek-bengek urusan akademik ini. Terima kasih tiada hingga-hingganya, kawan. Tanpamu mungkin aku sudah lama terpental dari kampus perlawanan ini. Kepada Sahabat Syaiful Bahri, kerja kerasmu membuat segalanya menjadi terasa begitu

mudah. Tak seruwet yang kubayangkan sebelumnya. Makasih banget, pul..!

11. Kepada kawan-kawan seperjuangan, sahabat-sahabatku: Ryan Mizard, Aziz Qirun, Nasrul Fany, M. Chu'an, Yulis, Thoing, Hesbul Bahar, Jakfar Shodiq, Gen Manca, Ali Gondez, Bandeng dan Fia, Yusuf Jaelani, Abdul Muis, Arif Ompong, Barbarez, Rifqi el-Moe, Waffa, Sardido, irwan hayat, Jo, Sabri, Udin, dan 'mereka' yang tidak mungkin penulis sebutkan semuanya. Tak berlebihan kiranya jika penulis menyebut kalian sebagai para Pejuang Revolusi yang pernah lahir ke dunia. Seterjal apapun perjuangan ini, harap dan do'a menyertai kalian, semoga ruang dan waktu mempertemukan kita kembali dalam medan yang lebih nyata. Terima kasih atas segalanya sahabat. Tetaplah berkukuh pada azas, sebab tanpanya segala-gala tak lebih sekedar penjagalan, atas nama apapun..! Dan kepada kalian yang berdiri diseberang jalan, terima kasih kusampaikan. Kalianlah yang sanggup membuat keningku berkerut hingga aku tak membeku dalam keterlanaan.

12. Kepada seluruh senior, kakak, teman, dan guru penulis. Khususnya, Mas Muhaimin Iskandar (Ketua Umum DPP PKB) yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk berdiskusi panjang dengan penulis dimalam penentuan yang begitu menegangkan menunggu keputusan PN Jakarta selatan tentang sengketa politik PKB dengan Gus Dus. Mas Eman Hermawan (Ketum DKN Garda Bangsa dan

Wakasekjen DPP PKB) yang tak pernah lelah memotivasi dan menantang penulis untuk segera ‘uji kemampuan’ dipanggung yang lebih nyata. Mas Umaruddin Masdar (KMNU DIY) yang tak pernah mengeluh mendidik penulis dengan epistemologi pengetahuan yang ‘aneh’. Terima kasih juga atas bantuannya menyediakan berbagai referensi bagi penulisan skripsi ini. Bang Andy M. Ramly (Ketua DPP PKB), Mas Agus Sulistyono (Wakil ketua DPRD DIY) yang telah memberikan segala kemudahan kepada penulis. Kang Sukoyo (anggota DPRD DIY), Sahabat Anwar S.Th.I. (Wakasekjend DPW PKB DIY), Prabu Shofi, Maemun Afifi (Ketua DPC PPNUI Sleman), Kang Gareng, Kang Dedy, Kang Nastain, Lek Bejo, Sorry kalau selama ini penulis ‘rewel’, thanks berat, lek. Tidak ada kata yang dapat mewakili rasa terima kasih penulis kepada kalian selain do’a tulus semoga apa yang telah kalian berikan dapat penulis balas dengan harga yang pantas dan senyum kebanggaan. Karena kalianlah inspirasi itu lahir. Kepada kalian semua, semoga Sang Penguasa Jagad memberi balasan lebih dari yang kalian bayangkan Amien.

13. Kepada seluruh keluarga besar DEMA UIN SUKA periode 2005-2007. terimakasih tak terhingga atas komitmen, dedikasi, dan kerja keras kalian. Tanpa kalian semua, aku takkan berarti apa-apa. Tetap berlawan...!

14. Kepada seluruh kawan-kawan pergerakan, HMI, HMI-MPO, KAMMI, IMM, GMNI, LMND, terima kasih atas dialektika cerdasnya, kalianlah

yang menyulutku dalam keterjagaan. Mari kibarkan terus bendera perjuangan..!

15. Dan semua pihak yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu, terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan.

Sepenuhnya penulis sadar akan banyaknya kekurangan dan cacat dari karya ini baik dari sudut isi maupun metodologi, karenanya penulis dengan segala kerendahan hati memohon kritik, saran, dialektika, dan tegurannya. Penulis juga memohon maaf sebesar-besarnya khusus kepada semua pihak atas kekurangan, kekhilafan, kealpaan, dan ketidakseriusan selama mengemban amanat menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 10 Januari 2009

Penyusun,

ABU HANIFAH
NIM: 01510603

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAKSI	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	17
D. Tinjauan Pustaka	18
E. Metode Penelitian	19
F. Sistematika Pembahasan	21
BAB II. BIOGRAFI A. MUHAIMIN ISKANDAR	
A. <i>Setting</i> Sosial-Kultural Muhaimin Iskandar	23
B. Latar Belakang Pemikiran Politik Muhaimin Iskandar	26
C. Karier Organisasi dan Politik Muhaimin Iskandar	28
D. Karya-karya Muhaimin Iskandar	39

**BAB III. AKAR PEMIKIRAN POLITIK DAN DEMOKRASI DI
INDONESIA**

A. Peta Pemikiran Politik di Indonesia	45
1. Pemikiran Politik di Era Orde Lama.....	53
2. Pemikiran Politik di Era Orde Baru.....	58
3. Pemikiran Politik di Era Reformasi.....	69
B. Wacana dan Pasang Surut Demokrasi di Indonesia	73
1. Wacana Demokrasi.....	73
2. Pasang Surut Demokrasi di Indonesia.....	98
a. Demokrasi Parlementer.....	99
b. Demokrasi Terpimpin.....	103
c. Demokrasi Pancasila.....	106

**BAB IV. EKSPERIMENTASI PEMIKIRAN POLITIK MUHAIMIN
ISKANDAR**

A. Muhaimin dan Cita-Cita Kebangkitan Bangsa	109
1. Konteks Global.....	117
2. Konteks Nasional.....	122
B. Komitmen atas Pluralitas Kebangsaan	126
C. Melampaui Demokrasi sebagai eksperimentasi pemikiran politik Muhaimin Iskandar	133
1. Strategi Menjinakkan Globalisasi.....	133
2. Basis Epistemologis.....	143
3. Peretas Kebuntuan Demokrasi.....	148

4. Sentralisme Demokrasi	156
--------------------------------	-----

BAB V. PENUTUP

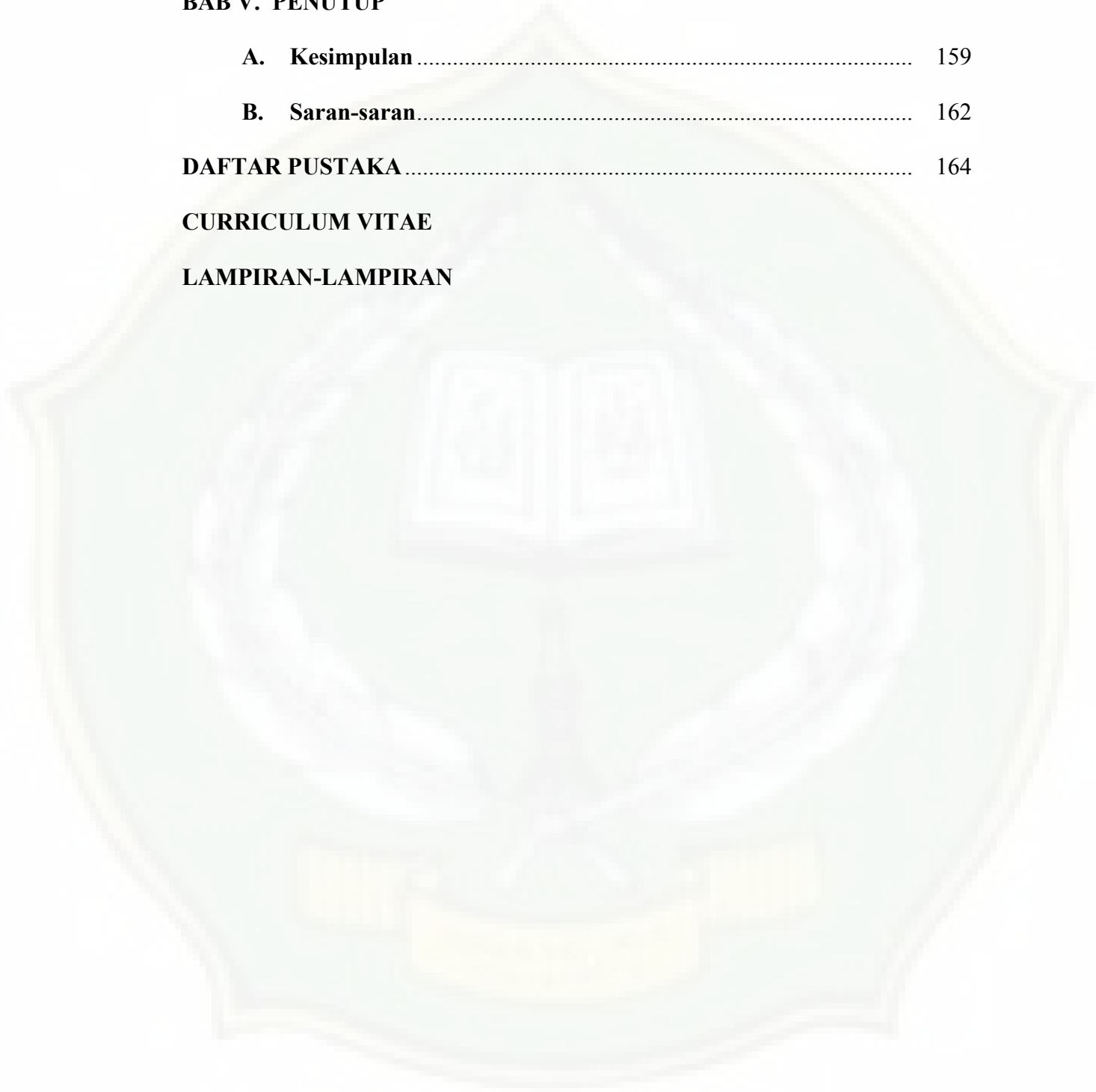
A. Kesimpulan	159
---------------------	-----

B. Saran-saran.....	162
---------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA	164
-----------------------------	------------

CURRICULUM VITAE

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

**MELAMPAUI DEMOKRASI:
EKSPERIMENTASI PEMIKIRAN POLITIK A. MUHAIMIN ISKANDAR**

A. Latar Belakang Masalah

Berakhirnya era perang dingin¹ (*cold war era*) antara Blok Barat vs Blok Timur yang ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin yang memisahkan antara Jerman Barat dengan Jerman Timur (1989) dan tumbangnya Uni Soviet Tahun 1991 sebagai pemimpin Blok Timur sosialis, mendorong terjadinya pergeseran dalam konstelasi tata dunia politik global. Pertarungan ideologi besar dunia berikut rebutan pengaruh oleh dua kutub kekuatan dunia terhadap negara-negara dunia ketiga kini sudah berakhir. Kemenangan Blok Barat yang disponsori oleh Amerika atas Blok Timur, oleh Francis Fukuyama, dimaknai sebagai kemenangan Ideologi kapitalis dan demokrasi liberal.² Ideologi ini

¹ Terminologi “perang dingin” secara lazim dipergunakan oleh berbagai kalangan untuk menandai suatu fase historis pertarungan dua ideologi besar dunia: kapitalisme vs sosialisme. Kapitalisme adalah ideologi yang diusung oleh Blok Barat yang dikomandoi oleh USA, sedangkan sosialisme adalah ideologi yang di anut oleh Blok Timur yang dikomandoi oleh USSR.

² Kapitalisme berarti sistem ekonomi yang menekankan peranan modal, yakni kekayaan dalam segala jenisnya, termasuk barang yang digunakan dalam produksi barang lainnya. (1) Ungkapan klasik kapitalisme dikaitkan dengan Adam Smith. Dia menganjurkan permainan bebas pasar yang memiliki aturannya sendiri. Ia yakin, dengan persaingan, pekerjaan dari *tangan yang tak kelihatan* akan menaikkan harga-harga kepada tingkat-tingkat *alamiah* dan mendorong tenaga kerja dan modal beralih pada perusahaan yang kurang menguntungkan. Pendek kata, usaha-usaha kompetitif manusia akan dengan sendirinya berubah menjadi kepentingan bersama (kesejahteraan bersama); (2) Istilah Perancis *laissez-faire* (semaunya) ditempelkan pada *kapitalisme* sebagai ungkapan penyipat. Ungkapan kapitalisme *laissez-faire* menekankan kepentingan-kepentingan ekonomi dibiarkan jalan sendiri agar perkembangannya berlangsung tanpa pengendalian pemerintah dan dengan regulasi sedikit mungkin. Lihat Loren Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 391. Marx memberi arti sebagai sistem produksi komoditi (ekonomi) di mana produsen tidak saja menghasilkan barang keperluannya sendiri akan tetapi sudah melibatkan pertukaran dengan pasar (*exchange market*) yang mencakup nasional bahkan berkecenderungan mengglobal-internasional. Lihat Anthony Giddens, *Kapitalisme dan Teori*

dianggap paling sah karena sudah melewati uji-tanding sejarah yang panjang, dan merupakan puncak evolusi peradaban umat manusia.³ Sistem ekonomi kapitalis dan demokrasi liberal lantas mengalami proses persebaran transnasional yang massif ke berbagai negara-negara dunia ketiga. Tak terkecuali Indonesia.

Dalam langgam historis bangsa, demokrasi sebenarnya telah lama dianut sebagai sistem ketatanegaraan kehidupan bernegara dan berbangsa. Akan tetapi, dalam perjalanannya demokrasi tidak jarang menuai beragam hambatan atau bahkan ancaman. Salah satu ancaman terbesar yang sedang dihadapi demokrasi Indonesia saat ini adalah keputusan terhadap demokrasi itu sendiri yang tidak kunjung terkonsolidir serta melemahnya kekuatan gerakan demokrasi dalam berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang anti-demokrasi.

Potret pergulatan wacana nasionalisme, demokrasi, dan agama di Indonesia mulai diperkenalkan oleh para founding fathers sebagai landasan dalam berbangsa dan bernegara semenjak penyusunan awal naskah UUD 1945⁴ oleh BPUPKI⁵ dan PPKI⁶. Para *founding fathers* seperti Soekarno,

Sosial Modern; Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim dan Marx Weber (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 57.

³ Francis Fukuyama adalah Dekan Fakultas di Paul H. Nitze School of Advance International Studies, John Hopkins University.

⁴ Miriam Budiardjo, *Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 37.

⁵ BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, sebuah badan yang di bentuk oleh pemerintahan Jepang dan mengambil alih tugas badan sebelumnya (PPKI) dalam rangka menyiapkan usaha-usaha kemerdekaan Indonesia di waktu yang tepat diketuai oleh Dr. Radjiman Widyodiningrat. Lihat, Mic Tarunan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia* (Solo: Pustaka Sinar Harapan dan UNS Press, 1995), hlm. 153.

Soepomo, Mohammad Hatta dan Muhammad Yamin, bekerja keras merangkai, menyusun, dan menyempurnakan konsep tentang Negara bagi Indonesia saat itu. Perdebatan panjang dan silang pendapat yang tajam diantara mereka dalam konteks pencarian landasan kenegaraan Indonesia, memberikan contoh konkrit bagaimana demokrasi seharusnya dipraktikkan.

Pasca revolusi kemerdekaan 1945, Indonesia mengalami serangkaian proses perubahan politik yang signifikan dan akan menjadi fondasi bagi bangunan politik di masa mendatang. Fase pertama adalah sebuah proses politik yang berlangsung pada sebuah era yang populer dinamai dengan era demokrasi liberal. Fase ini ditandai dengan kekuasaan politik yang boleh dibilang berada hampir sepenuhnya di tangan politisi sipil yang berpusat di parlemen. Di lembaga legislatif inilah duduk para politisi-politisi yang mewakili banyak partai atau golongan. Kekuasaan kaum politisi sipil dengan sistem multipartai dan parlemennya merupakan ciri khas dari demokrasi liberal. Proses politik yang berkembang pada sistem politik ini, sangat diwarnai dengan konflik-konflik politik dan pertarungan ideologis antara berbagai kelompok dan golongan.⁷

Pada fase awal ini (1945-1949), kehidupan berdemokrasi mulai lahir dan tumbuh berkembang di Indonesia seiring dengan jatuh banggunya kabinet Parlemerter yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri (PM). Pada masa

⁶ PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sebuah badan panitia *ad hoc*, yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang dengan tujuan untuk menyiapkan dan merumuskan persiapan-persiapan kemerdekaan Indonesia bila waktunya sudah tiba.

⁷ Alfian: *Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia* (Jakarta, PT Gramedia Pustaka 1992), hlm. 5.

itu, setiap kepemimpinan PM yang dianggap gagal, akan mendapat penentangan keras atau bahkan *impeachment* dari parlemen.⁸ Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari pilihan sistem ketatanegaraan parlementarian yang dianut. Maka tidak heran apabila kabinet bisa jatuh bangun dan PM silih berganti dalam durasi yang sangat cepat. Rakyat turut bertanggungjawab dan terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Suara rakyat menjadi barometer keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan yang sedang berlangsung. Rakyat melalui anggota parlemen (Komite Nasional Indonesia Pusat)⁹ mengawasi secara aktif jalannya pemerintahan. Periode ini menjadi modal awal yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia dalam memaknai dan belajar mempraktekkan demokrasi di masa yang akan datang. Periode ini ditandai juga dengan hingar-bingarnya genderang perang yang ditabuh oleh masing-masing partai politik dan tumbang-tegaknyanya pemerintahan yang berujung pada instabilitas politik nasional.

Begitupun kurun waktu 1950-1959, UUDS 1950 memberikan ruang yang lebih besar bagi tumbuhnya partisipasi rakyat dalam kehidupan bernegara. Sistem kabinet parlementer memberikan pelajaran yang berharga dalam memahami kehendak rakyat dan mengelola negara. Sayangnya pertumbuhan demokrasi kearah yang diidealkan harus terinterupsi dengan

⁸ Miriam Budiardjo, *Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, hlm. 237.

⁹ KNIP adalah badan yang dibentuk dan memiliki fungsi legislatif untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Lihat, Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. XVI (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 119.

dikeluarkannya dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.¹⁰ Dengan dalih mencegah dampak buruk dari instabilitas politik yang ditimbulkan oleh partai-partai politik yang sedang berseteru dan alasan demi menjaga integrasi bangsa yang sedang terancam, dekrit presiden tersebut memberikan otoritas hampir tidak terbatas kepada presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dekret presiden ini menandai terjadinya pergeseran peta kekuatan politik dengan semakin surutnya peran dan kekuasaan parlemen. Peranan kaum politisi sipil dengan partainya menjadi semakin susut dalam kanvas percaturan politik Indonesia. Hal itu mengakibatkan kekuasaan hampir sepenuhnya berada di tangan Presiden Soekarno. Sejak saat itu, masa suram demokrasi di Indonesia berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang hingga melampaui 39 tahun kemudian.

Akan tetapi, semangat perjuangan menegakkan demokrasi tak pernah surut dan tetap berlangsung dengan gigih. Buku Bung Hatta¹¹ dengan judul *Demokrasi Kita* (1960),¹² yang kemudian dilarang beredar, merupakan salah satu bukti bahwa hasrat untuk memperjuangkan penegakan demokrasi tidak pernah berakhir. Kegagalan Bung Karno dalam mengatasi konflik terbuka antar partai politik nasional di dalam negeri dan efek domino perang dingin di level internasional,¹³ serta semakin memburuknya kondisinya perekonomian

¹⁰ Dekrit yang dikeluarkan oleh Soekarno hingga detik ini masih menimbulkan pro-kontra dalam perspektif yuridis konstitusional.

¹¹ Mochammad Hatta adalah salah satu proklamator dan Wakil Presiden pertama RI. Beliau adalah aktivis pergerakan semenjak era kolonial belanda.

¹² Muhammad Hatta, *Demokrasi Kita* (Jakarta: Panji Masyarakat, 1960), hlm. 87.

¹³ Hans antlov, *Pengantar dalam Buku: Grgorius Sahdan, Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto* (Yogyuakarta: Pondok Edukasi, 2004), hlm, x.

rakyat yang disertai dengan inflasi yang menjulang, mendorong lahirnya rezim baru yang anti demokrasi.

Situasi politik nasional yang terkonsentrasi di tangan presiden mengakibatkan demokrasi tidak menemukan ruang yang memadai untuk tumbuh dan berkembang. Kondisi tersebut diperparah dengan naiknya Soeharto sebagai presiden melalui kudeta berdarah pada tahun 1965. Dibawah kendali rezim Soeharto yang fasis-militeristik,¹⁴ demokrasi di negeri ini dibonsai dan benar-benar mati suri. Rezim yang berlatar belakang militer ini, berhasil melakukan rekayasa hampir menyeluruh terhadap sistem politik nasional dengan kooptasi kekuasaan yang luas di tengah masyarakat Indonesia.¹⁵ Melalui *ideological state apparatus (ISA)* dan *state apparatus (SA)*¹⁶ orde baru mendeterminasi seluruh kesadaran dan ruang publik bahkan sampai menembus ruang-ruang pribadi. Rakyat dimobilisasi untuk memasuki sebuah sistem politik baru yang jauh dari nuansa demokratis. Perbedaan pendapat, kritik dan partisipasi rakyat diharamkan oleh penguasa melalui berbagai instrumen kekuasaannya. Sebaliknya, kepatuhan, ketakutan dan keseragaman menjadi ciri perilaku sistem politik kekuasaan yang baru.¹⁷

¹⁴ Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 237.

¹⁵ A. Muhaimin Iskandar: *Manajemen Komunikasi Partai Kebangkitan Bangsa*. (Jakarta: Pustaka Bumi Selamat, 2001), hlm. 05.

¹⁶ Dalam hal ini penulis meminjam terminologi politik yang diperkenalkan oleh Antonio Gramsci, seorang Neo-Marxis asal Italia. Ideological State Apparatus (ISA) adalah struktur nilai yang di gunakan oleh penguasa untuk mengendalikan dan memasung aktivitas politik rakyat. Sedangkan State Apparatus adalah lembaga-lembaga negara seperti birokrasi, tentara dan sebagainya. Keduanya di gunakan oleh penguasa sebagai instrumen pengendali aktivitas-aktivitas rakyatnya.

¹⁷ Ariel Heryanto: *Perlawanan Dalam Kepatuhan: Esai-Esai Budaya*, (Bandung, Mizan, 2000), hlm. 399.

Rezim militer yang tampil ke puncak kekuasaan politik pasca G-30S-PKI ini tidak menyisakan ruang sedikitpun bagi berkembangnya kehidupan yang demokratis. Meskipun demikian, lembaga-lembaga demokrasi tetap dipertahankan untuk menjaga citra kekuasaan namun pada saat yang sama lembaga-lembaga tersebut dipreteli hak-hak politiknya. Pada kenyataannya, lembaga-lembaga tersebut hanya berfungsi sebagai tukang stempel dari setiap kebijakan penguasa.

Masa-masa kegelapan ini akhirnya menemukan secercah cahaya yang bersinar terang dipenghujung tahun 1997. Semangat perlawanan rakyat serentak bangkit melawan rezim militer yang telah berkuasa sejak akhir tahun 1960-an ini. Gelombang besar reformasi yang digelindingkan oleh massa rakyat berhasil memaksa rezim militer ini untuk menyerahkan kekuasaannya yang telah 32 tahun dimonopoli. Tumbangnya rezim Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, berhasil membangkitkan kembali spirit demokrasi yang selama ini lumpuh terbaring.¹⁸

Pasca tumbangnya Soeharto, harus diapresiasi dengan jujur bahwa Presiden Habibie memiliki jasa yang cukup besar dalam memberi ruang yang luas bagi perkembangan demokrasi. Dan melalui pintu demokrasi yang terbuka lebar jugalah, kekuasaan Habibie tidak dapat dipertahankan pada SU MPR 1999. Reformasi 1998 dengan demokratisasi sebagai agenda utamanya telah membuka babak baru sekaligus menjadi titik balik dalam konstalasi politik nasional menuju kearah yang lebih sehat, demokratis, dan terbuka.

¹⁸ A. Muhaimin Iskandar, *Manajemen Komunikasi Partai Kebangkitan Bangsa*. hlm. 03.

Terpilihnya Gus Dur dan Megawati secara mengejutkan sebagai pasangan presiden dan wakil presiden pada SU MPR 1999 memberikan langgam kepastian bahwa roda demokratisasi akan terus bergerak¹⁹. Terlepas dari berbagai manuver politik yang mengkhawatirkan kehidupan demokrasi, tindakan politik Gus Dur selaku presiden RI sangat bermakna dalam mematangkan watak dan gerakan demokrasi di tengah kebuntuan demokrasi di masa-masa sebelumnya. Kesadaran yang mendalam dari segenap elemen bangsa dalam menjalankan nilai-nilai demokrasi yang baik, telah menyelamatkan bangsa ini dari bahaya disintegrasi akibat perbedaan pandangan politik yang tajam. Kedewasaan bangsa ini dalam berdemokrasi telah terbukti berhasil melakukan proses alih kekuasaan dengan damai tanpa dibayangi ketakutan terjadinya anarki dan tindakan destruktif lainnya.

Di sisi lain, sepuluh tahun sudah reformasi bergulir ternyata belum mampu membawa bangsa ini keluar dari jeratan krisis multidimensi. Di era transisi ini, rakyat memang bisa menghirup udara kebebasan politik tanpa harus khawatir adanya intimidasi dari korps berseragam loreng. Sudah dua kali pemilu dilaksanakan dan tiga kali terjadi pergantian presiden – KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) – akan tetapi secara substantif belum mampu membawa rakyat beranjak dalam taraf kesejahteraan. Rakyat masih saja hidup di bawah garis kemiskinan, angka pengangguran semakin membengkak, utang

¹⁹ A. Muhaimin Iskandar, *Melampaui Demokrasi: Merawat Bangsa Dengan Visi Ulama* (Yogyakarta: KLIK R, 2006), hlm. 95

luar negeri makin menumpuk, dan budaya korupsi masih saja mewarnai kehidupan elit-elit politik.

Pada level formal-prosedural proses demokratisasi di Indonesia yang menggelinding sejak reformasi '98 sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Mulai dari amandemen UUD 1945, pemilihan presiden-wakil presiden / kepala daerah secara langsung dan pembentukan beberapa institusi demokrasi menjadi landasan yang memadai untuk menopang proses pembaharuan politik dan pelebagaan demokrasi di Indonesia. amandemen keempat UUD 1945 telah melahirkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diatur dalam BAB VIIA pasal 22C-22D, Mahkamah Konstitusi (MK), diatur dalam BAB IX pasal 24C-25 , Komisi Yudisial (KY), diatur dalam BAB IX pasal 24B²⁰ dan beberapa Komisi Negara lainnya. Tradisi politik baru yang lebih demokratis sudah mulai tumbuh. Lembaga-lembaga politik juga mulai di tata dengan lebih baik yang memungkinkan terjadinya percepatan proses konsolidasi demokrasi.

Akan tetapi, lahirnya kultur politik dan institusi-institusi politik demokratis yang tercermin dalam pemilihan presiden langsung, amandemen UUD 1945 dan lain sebagainya tidak berkorelasi positif dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat atau proses demokratisasi juga mampu menjamin rasa keadilan rakyat. Secara substansial, kehidupan masyarakat terutama menyangkut kesejahteraan tidak kunjung membaik. Angka pengangguran tidak bisa ditekan, bahkan meningkat, hasil pusat statistik Badan Penelitian

²⁰ UUD RI 1945 Paska Amandemen yang keempat

Statistik tahun 2004 menyebutkan bahwa saat ini terdapat sekitar 9,5 juta pengangguran terbuka. Jumlah ini diukur berdasarkan ukuran satu jam bekerja selama seminggu. Artinya, jumlah pengangguran yang sesungguhnya, berdasarkan kebutuhan wajar untuk bekerja jauh lebih banyak.²¹

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang abadi, ia dapat berdiri atau terbaring, menang atau kalah namun tidak akan pernah mati. Karena demokrasi adalah sistem nilai yang menjadi ruh dari jiwa-jiwa merdeka yang akan senantiasa hidup sepanjang zaman. Sejarah bangsa telah membuktikan bahwa demokrasi di Indonesia tidak pernah mati. Perlawanan rakyat yang menuntut hak-hak dasar politiknya terhadap rezim otoriter Soekarno maupun Soeharto adalah bukti bahwa demokrasi tidak pernah benar-benar bisa dipunahkan. Ada masa pasang dan surut kehidupan demokrasi, sebagaimana terjadi hingga hari ini.

Sistem demokrasi tentu tidak selalu menyenangkan bahkan terkadang menyakitkan, sebab dalam proses demokrasi senantiasa menghasilkan kemenangan dan kekalahan. Sikap seorang demokrat sejati akan terlihat disaat ia menghargai kemenangan kelompok lain maupun saat menerima dengan lapang dada atas kekalahannya. Sekalipun banyak cara dan jalan menuju demokrasi, namun hasil demokrasi tidak memberikan pilihan yang banyak. Penghargaan kepada yang menang dan kalah dalam suatu kontestasi politik merupakan kemenangan yang gemilang bagi demokrasi.

²¹ Dokumentasi Hasil Muktamar II Partai Kebangkitan Bangsa Semarang, 16-19 April 2005, cet. II (Jakarta: DPP PKB, 2005) hlm. 80.

Filsafat Politik merupakan sebuah kajian yang tidak akan pernah usang untuk terus dikaji dan ditelaah. Perubahan iklim politik setiap sejarah politik dimanapun di belahan dunia ini, akan selalu memberikan inspirasi baru bagi peminat maupun pemerhati filsafat politik untuk terus mengkaji lebih mendalam dan strategis. Terlebih ketika filsafat politik dikaji dari ruang yang lebih spesifik lagi, semisal ekonomi, sosial, pendidikan dan agama. Ini menjadikan setiap kajian filsafat politik semakin menarik. Dan kalau sampai saat ini sebagai pengkaji filsafat masih berkeyakinan bahwa peranan filsafat dalam melihat dan memetakan setiap permasalahan pengetahuan adalah yang paling mendasar, atau untuk sekedar mendapatkan landasan filosofis adalah merupakan kuncinya. Maka kajian terhadap filsafat politik adalah merupakan studi yang perlu dipertimbangkan. Termasuk dalam hal ini permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Sangat beragam pendapat para pakar politik tentang konsep dasar demokrasi dari teori politiknya. Mengingat sejarah politik banyak menysikan pertanyaan etis. Sejak akademi Plato sampai institusi pendidikan besar masa kini studi politik selalu mendapat sambutan hangat dan tempat yang terhormat.²²

Relasi antara negara dan agama memang memiliki perdebatan yang sangat panjang, namun bagaimanapun politik banyak memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia, tidak terkecuali juga dengan kaum Muslim. Telah terjadi banyak *pro*

²² Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik; Kajian Historis Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. V.

dan *kontra* yang diakibatkan oleh pengaruh politik, yang lahir dari setiap generasi kaum Muslim dalam melihat permasalahan politik.²³

Konfigurasi politik di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini, memperlihatkan adanya fenomena dan kecenderungan untuk menegakkan negara Islam semakin gencar diteriakkan oleh beberapa kelompok Islam ekstrimis. Mereka beralasan kekuatan hukum negara yang ada saat ini telah banyak dimanipulasi oleh oknum-oknum tertentu dan tidak lagi sesuai dengan cita-cita awal para *founding fathers*. Sehingga disinyalir akan mempermudah bagi terjadinya penyimpangan dan rekayasa hukum demi menjalankan perilaku-perilaku yang mereka vonis sebagai *munkarat*.

Disamping itu, fakta sosiologis bahwa umat Islam adalah penduduk mayoritas di negeri ini,²⁴ semakin menguatkan keyakinan mereka bahwa hanya dengan negara yang menggunakan sistem kepemimpinan *Khilafah* dan hukum yang berlandaskan *Syari'at Islam* yang akan mampu memberikan kesejahteraan hakiki bagi bangsa Indonesia, dibandingkan dengan hukum-hukum yang ada saat ini dan hanya dijadikan alat legitimasi para elit politik dalam mempertahankan kekuasaannya.

Hal semacam ini terasa tidak asing lagi jika melihat fenomena yang mewarnai pentas politik nasional, yaitu dengan maraknya kampanye yang

²³ Pendapat ini sebenarnya lebih mengarah pada bentuk relasi negara dan agama Islam dalam melihat setiap perkembangan yang terjadi dalam dunia politik, yang kemudian menjadi sumber perbedaan umat Islam dalam melihat dan bersikap politis terhadap permasalahan negara dalam kaitannya dengan peran agama. *lihat*, Maftuh Abegebriel dkk, *Negara Tuhan; The Thematic Encyclopaedia*, (Yogyakarta; SR-Ins, 2004), hlm. 2

²⁴ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik; Perbandingan Antara Islam dan Barat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 5

mereka lakukan dalam bentuk aksi massa maupun melalui media, dengan menyuarakan pandangan politik mereka terhadap isu-isu aktual dengan senantiasa menyisipkan isu tentang pendirian Negara Islam sebagai solusi paling manjur atas problematika kebangsaan. Ditambah lagi dengan semakin menghangatnya permasalahan *terorisme* dengan segala tafsir dan perdebatannya, yang dari tahun ke tahun semakin menemukan tempatnya dalam peta politik nasional maupun internasional.

Pro-kontra terhadap wacana pendirian Negara Islam dan sistem *Khilafah* oleh beberapa kelompok tertentu di negara ini sejak beberapa tahun terakhir begitu menghantui seluruh komponen bangsa. Parahnya lagi kelompok ini menuding bahwa demokrasi sudah usang dan harus diganti dengan sistem *Khilafah*. Tidak bisa dipungkiri bahwa sistem demokrasi yang dipilih sebagai sistem ketatanegaraan di negeri ini juga masih memiliki banyak kelemahan yang harus segera dibenahi.

Bagi banyak kalangan cendekiawan Muslim pemaknaan Islam sebagai agama *Rahmatan lil Alamin* adalah sebuah pengetahuan yang bersifat spiritual, yang menegaskan bahwa Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia tidak hanya dengan sang *Khalik*, namun juga mengatur relasi antar manusia baik dalam konteks sosial, budaya, politik, ekonomi dan sebagainya. Namun perbedaan pandangan dalam melihat setiap permasalahan keagamaan menjadikan Islam terkadang salah dipahami oleh ummatnya, semisal *Inna Al-Islam Din wa Daulah* (sesungguhnya Islam itu adalah agama dan negara) telah banyak dipahami oleh sebagian kaum muslim sebagai

sebuah teologi politik yang kaku, sehingga pemaknaan Islam terkesan literlek dan buta, yang kemudian secara formalistik-legalistik *Negara Islam* menjadi jawaban dalam setiap kebijakan-kebijakan yang bersifat politis.²⁵

Dalam sejarah perkembangannya, pertautan antara Islam dan demokrasi menemukan bentuk perjumpaan yang mengesankan dan telah terjalin dalam waktu yang sangat panjang. Meskipun pada medio abad ke-19 kata demokrasi benar-benar dianggap penting dan dinilai positif oleh negara-negara yang mayoritas beragama Islam. Dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Islam sebenarnya secara substantif juga mencerminkan penghargaan yang tinggi terhadap pengakuan hak asasi manusia, aspirasi rakyat, kebebasan berkelompok yang menjadi nilai pokok dalam demokrasi.²⁶ Kiranya negara Islam tidak selamanya mengasumsikan tidak demokratis dan kaku, karena bagaimanapun nilai-nilai humanisme dan pengakuan hak asasi manusia di dalam Islam memiliki tempat yang paling utama.

Penulis ingin melihat persoalan demokrasi sebagai sistem politik dan nilai-nilai kebangsaan yang saat ini dijadikan sebagai landasan untuk melihat persoalan politik Indonesai ke arah yang lebih filosofis. Artinya landasan teoritis apakah yang kemudian dijadikan dasar gerakan politiknya? Bagaimana sebenarnya pemaknaan demokrasi itu sendiri?

²⁵ Gagasan politik Islam seperti itulah, yang semenjak awal Islam dirujuk oleh banyak organisasi Islam. Lihat. Maftuh Abegebriel dkk, *Negara Tuhan; The Thematic Encyclopaedia* (Yogyakarta; SR-Ins, 2004), hlm. 6

²⁶ Jalaluddin Rahmat menyebutkan, bahwa barat lebih menekankan sentimen *miring* dari setiap respon ummat Islam terhadap demokrasi, yaitu pada hal yang lebih negatif, ini ditegaskan dengan menstreatipkan negara-negara Islam masuk dalam kategori antidemokrasi, lihat pengantar dari buku Yamani. *Antara Al-Farabi dan Khomeini; Filsafat Politik Islam*. (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 20

Sebelum dibahas lebih jauh, penulis ingin menegaskan bahwa akan sangat merepotkan, ketika penulis harus melihat persoalan politik pada tema-tema besar seperti di atas. Penulis mengambil alternatif kajian melalui studi pemikiran terhadap tokoh yang memiliki basis historis dalam dunia politik khususnya di Indonesia, baik secara intelektual maupun pengaruhnya dalam perkembangan politik kebangsaan. Oleh karena itu, penulis memilih seorang tokoh yang bernama A. Muhaimin Iskandar yang saat ini sedang menjabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) dan wakil ketua DPR RI periode 2004-2009.

Sebagai intelektual muda dan sebagai tokoh politik nasional Muhaimin Iskandar banyak memiliki gagasan yang brilian dibidang politik dan demokrasi. Hal ini bisa dimafhumi tidak semata-mata karena Muhaimin intens dalam pergulatan di pentas politik nasional dan memimpin salah satu partai terbesar di Indonesia yaitu PKB, tetapi juga karena proses panjang Muhaimin dalam pergulatan intelektual serta sangat produktif dalam menelorkan gagasan-gagasan baru. Sebagai intelektual muda yang secara ideologis-kultural berasal dari lingkungan Nahdliyyin, sangat wajar apabila pemikirannya banyak dipengaruhi oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang notabene adalah tokoh intelektual Islam papan atas di negeri ini. Gus Dur bahkan pernah menjadi pemimpin bangsa sebagai presiden RI ke-4 dari kelompok tradisional (NU) yang mengejutkan banyak pihak baik di level

nasional maupun internasional.²⁷ Salah satu karya yang harus disebut ketika membicarakan Muhaimin Iskandar dalam bidang politik adalah sebuah buku yang berjudul: *Melampaui Demokrasi; Merawat Bangsa dengan Visi Ulama*.²⁸

Muhaimin Iskandar dalam buku *Melampaui Demokrasi; Merawat Bangsa dengan Visi Ulama* menyebutkan bahwa dia mempercayai akan tercapainya Indonesia yang berdaulat, berkeadilan, makmur, dan damai apabila demokrasi tidak dijadikan tujuan tetapi sebagai instrumen (*wasilah*) dan syari'at sebagai jalan untuk mencapai mencapai tujuan-tujuan mulia dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Karena kita bekerja bukan untuk teori, prosedur tapi untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.²⁹

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, nampak bahwa studi pemikiran Muhaimin Iskandar, terutama konsepsi tentang melampaui demokrasi merupakan kajian yang sangat menarik untuk ditelaah secara serius dan mendalam. Demokrasi tentu tidak dapat dipisahkan dari pemikiran Muhaimin Iskandar tentang *Melampaui Demokrasi; Merawat Bangsa dengan Visi Ulama*. Di mana karya tersebut merupakan kesatuan pemikiran yang tidak dapat dipisahkan dari konsep ajaran Islam, dan ide-ide kebangsaan.

²⁷ Umaruddin Masdar, *Gus Dur; Pecinta Ulama Sepanjang Zaman, Pembela Minoritas Entis-Keagamaan* (Jogjakarta; Klik R, 2005), hlm. xi

²⁸ A. Muhaimin Iskandar, *Melampaui Demokrasi: Merawat Bangsa Dengan Visi Ulama*, hlm. 58.

²⁹ A. Muhaimin Iskandar, *Melampaui Demokrasi: Merawat Bangsa Dengan Visi Ulama*, hlm. 66

Pemikiran-pemikiran Muhaimin Iskandar yang lain hanya akan disinggung sejauh mendukung alur pembahasan.

Secara lebih rinci, permasalahan yang akan dikaji dalam studi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses genealogis konsepsi demokrasi Muhaimin Iskandar dalam kontruksi ajaran Islam dan ide-ide kebangsaan?
2. Bagaimana eksperimentasi pemikiran politik Muhaimin Iskandar dalam konstalasi politik nasional?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Muhaimin Iskandar tentang melampaui demokrasi dalam konteks perpolitikan kontemporer di Indonesia?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan

Sudah menjadi sebuah keharusan bagi setiap penulis dalam mengemukakan tujuan dari penulisan setiap karyanya. Maka oleh karena itu, penulisan skripsi ini memiliki tujuan:

1. Menjelaskan tentang proses terbentuknya genealogi pemikiran politik Muhaimin Iskandar.
2. Menjelaskan konsepsi Muhaimin Iskandar tentang Melampaui Demokrasi dan relevansinya dengan konstelasi politik di Indonesia.
3. Sumbangan ilmiah bagi perkembangan konsesi demokrasi di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Sebenarnya tulisan yang berkenaan dengan demokrasi sangat banyak penulis jumpai, namun dari beberapa tulisan yang penulis temui, baik yang berupa artikel, buku, maupun yang lain belum ada yang spesifik membahas persoalan demokrasi dalam pandangan Muhaimin Iskandar.

Studi terhadap demokrasi sebagai sistem politik hingga saat ini memang telah banyak penulis jumpai namun beberapa pandangan maupun gagasan para intelektual Muslim lebih banyak pada persoalan sejarah demokrasi. Seperti yang ditulis oleh Muhammad Hatta, dalam bukunya *Demokrasi Kita*, menjelaskan tentang krisis demokrasi yang terjadi pada masa kepemimpinan Soekarno.³⁰

Begitu juga dengan tulisan Miriam Budiardjo, dalam bukunya “*Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*”, lebih banyak membicarakan sejarah dan perbandingan demokrasi orde lama dan orde baru.³¹

Buku Anas Urbaningrum, *Melamar Demokrasi: Dinamika Politik di Indonesia*, yang merupakan kumpulan tulisan lebih banyak berbicara tentang proses demokrasi yang masih belum utuh dan terkonsolidasi.³²

Sedangkan buku Anders Uhlin, *Oposisi Berserak: Arus Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, lebih menyoroti proses dan dinamika

³⁰ Moh. Hatta, *Demokrasi Kita*, (Jakarta: Panji Masyarakat:1960)

³¹ Miriam Budiardjo, *Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Gramedia Pustaka: 2001)

³² Anas Urbaningrum, *Melamar Demokrasi: Dinamika Politik di Indonesia*, ()

persebaran ide-ide demokrasi di Indonesia. Uhlin juga menjelaskan tentang faktor dan aktor dibalik persemaian ide-ide demokrasi.³³

Buku *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto* yang ditulis oleh Gregorius Sahdan, lebih memfokuskan pada pembahasan tentang proses perjalanan transisi demokrasi dan pola-pola perkembangannya serta bentuk-bentuk ideal tentang proses transisi demokrasi menuju demokrasi yang terkonsolidasi. Buku ini juga menjelaskan tentang prospek konsolidasi demokrasi di Indonesia, setelah penguasa yang otoriterian.³⁴

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana peneliti mengumpulkan data melalui riset perpustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data diperoleh dari dan melalui data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui pengkajian mendalam atas karya Muhaimin Iskandar yaitu; *Melampaui Demokrasi: Merawat Bangsa Dengan Visi Ulama* (2006),³⁵ *Masyarakat Indonesia Abad XXI* (1996)³⁶, *Paradigma Arus Balik Masyarakat Pinggiran* (1997),³⁷ *Manajemen Komunikasi Partai Kebangkitan*

³³ Anders Uhlin, *Oposisi Berserak: Arus Deras Gelombang Demokratisasi di Indonesia*, (Bandung: Mizan Pustaka: 1998).

³⁴ Gregorius Sahdan, *Transisi Demokrasi Indonesia Pasca Soeharto*, (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2004).

³⁵ Muhaimin Iskandar, *Melampaui Demokrasi: Merawat Bangsa Dengan Visi Ulama*, (Yogyakarta: Klik R, 2006)

³⁶ Muhaimin Iskandar, *Masyarakat Indonesia Abad XXI*, (Jakarta: PB PMII, 1996).

³⁷ Muhaimin Iskandar dan Muhammad Nastain, *Paradigma Arus Balik Masyarakat Pinggiran*, Jakarta: PB PMII, 1997.

Bangsa (2001),³⁸ *Membajak di Ladang Mesin: Simpang Kepentingan Buruh-Negara-Modal di Tengah Arus Kapitalisme Global* (2004),³⁹ *Gus Dur yang Saya Kenal: Catatan Transisi Demokrasi Kita* (2004),⁴⁰ *Spiritualitas Sepak Bola* (2006).⁴¹

Sedangkan data-data sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka (buku, artikel, dokumen, internet, dan lain-lain) yang membahas pemikiran Muhaimin Iskandar tentang eksperimentasi Pemikiran politik. Dengan demikian sumber-sumber sekunder tersebut dapat melengkapi analisa penelitian ini.⁴²

Setelah data terkumpul, peneliti mengolah data tersebut dan mengklasifikasinya sesuai pokok kajian. Untuk mendukung langkah-langkah tersebut maka digunakan metode analisis diskriptif, yaitu menuturkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul, menganalisis suatu objek dengan memilah-milah antara satu pengertian lain untuk mendapatkan kejelasan suatu masalah.⁴³ Metode ini berguna untuk menghindari kerancuan konsep yang dibangun tokoh sehingga peneliti dapat menangkap gagasan secara akurat.

³⁸ Muhaimin Iskandar, *Manajemen Komunikasi Partai Kebangkitan Bangsa*, (Jakarta: Pustaka Bumi Selamat, 2001).

³⁹ Muhaimin Iskandar, *Membajak di Ladang Mesin: Simpang Kepentingan Buruh-Negara-Modal di Tengah Arus Kapitalisme Global*. (Semarang: Yayasan Wahyu Sosial, 2004).

⁴⁰ Muhaimin Iskandar, *Gus Dur yang Saya Kenal: Catatan Transisi Demokrasi Kita*, (Yogyakarta: LKIS, 2004).

⁴¹ *Spiritualitas Sepak Bola*, (Jogjakarta: KLIK R, 2006).

⁴² Anton Baker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), cet. Ke-1, h. 61-65.

⁴³ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 59.

Penulisan ini membahas ide-ide yang muncul di masa lampau yang lahir melalui proses pergulatan panjang. Karena itu pula penulisan ini menggunakan pendekatan analisis filosofis, yaitu suatu proses pendekatan terhadap suatu masalah yang meliputi pengumpulan dan menafsirkan suatu masalah dan gagasan yang muncul di masa lampau dan mencoba menyelami karya Muhaimin Iskandar tentang filsafat politiknya, untuk kemudian dapat menangkap arti, nilai serta maksud yang dikehendaki. Sehingga dapat dicapai pemahaman yang benar tentang pemikiran Muhaimin Iskandar tersebut.

Setelah melalui beberapa naskah sebagaimana di atas, penulis akan berusaha semaksimal mungkin melakukan analisis terhadap pemikiran Muhaimin Iskandar baik kelebihan, kelemahan, dan relevansinya untuk konteks saat ini. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh pemahaman yang seimbang dan proporsional.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan dalam skripsi.

Bab II membahas tentang biografi Muhaimin Iskandar dan karyanya. Hal ini mencakup riwayat hidup dan pendidikan Muhaimin Iskandar, latar belakang pemikiran, karya-karya dan karir politik Muhaimin Iskandar serta tokoh-tokoh yang mempengaruhinya.

Bab III akan difokuskan pada perkembangan politik dan akar sejarah demokrasi di Indonesia.

Bab IV merupakan pembahasan pokok pemikiran dari penelitian ini. Dalam bab ini akan dijelaskan pemikiran dan eksperimentasi politik Muhaimin Iskandar tentang Demokrasi meliputi tentang cita-cita kebangkitan bangsa, komitmen atas pluralitas kebangsaan dan gagasan tentang melampaui demokrasi, serta relevansi demokrasi dalam konteks kehidupan politik kontemporer di Indonesia.

Diakhiri bab V yaitu penutup yang berisikan kesimpulan atas analisa dari keseluruhan penjelasan dari bab-bab di atas. Yang berisikan penegasan dari hasil analisa. Serta berisikan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut penulis pemikiran politik Muhaimin Iskandar lahir dari sebuah pergulatan panjang atas bangunan-bangunan pemikiran politik yang sudah ada sebelumnya dan refleksi yang mendalam atas realitas kebangsaan. Dalam banyak hal Muhaimin sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terutama dalam hal komitmen atas nilai-nilai demokrasi dan pluralisme. Hal ini wajar karena Muhaimin tidak hanya sebatas keponakannya Gus Dur akan tetapi ia juga adalah murid ideologinya Gus Dur. Di sisi lain, pemikiran Muhaimin juga dipengaruhi oleh Soekarno terutama dalam konteks penolakan atas nilai-nilai demokrasi liberal ala barat dan upaya untuk menggalang aliansi alternatif Negara-negara dunia ketiga. Tidak bisa dilepaskan juga pengaruh Tan Malaka dalam struktur berpikir Muhaimin seperti yang terlihat pada cita-cita kemandirian 100% tanpa tergantung pada kekuatan politik manapun.

Gagasan ini berusaha serius untuk menempatkan tujuan kolektif sebagai landasan pokok dalam membangun sebuah sistem ketatanegaraan. Demikian juga gagasan ini berusaha untuk keluar dari kelaziman intelektualisme di Indonesai dengan menolak tunduk terhadap prosedur-prosedur ilmiah. Hal ini ditandai dengan epistemologi berpikirnya yang berusaha melampaui standar normatif pengetahuan. Pemikiran ini juga

berusaha untuk tidak terjebak dalam abstraksi pengetahuan yang berlebihan melalui pencarian terhadap esensi dari sebuah persoalan. Sebab ujung dari setiap proses berpikir bukanlah penemuan atas esensi atau hakikat dari sebuah persoalan akan tetapi pertarungan atas tujuan kolektif. Ia mencoba mendeteksi struktur yang bergerak di balik nalar pengetahuan.

Elaborasi dan pelacakan mendalam yang penulis lakukan terhadap gagasan pemikiran politik Muhaimin Iskandar bisa disimpulkan sebagai berikut: cita-cita kebangkitan bangsa adalah merupakan gagasan kunci pemikiran politik Muhaimin Iskandar. Gagasan pokok ini melahirkan gagasan penopang yang lebih bersifat praksis operasional bagi gagasan kebangkitan bangsa. Genealogi lahirnya gagasan ini adalah krisis multidimensi tak berujung yang menjerat bangsa Indonesia. Sudah seabad lebih bangsa ini memproklamkan kebangkitan nasionalnya, akan tetapi tidak ada proses akumulatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik berupa ideology, struktur politik bangsa, kebudayaan, maupun ekonomi bangsa. Hal ini bisa dilihat dari belum kokohnya bangunan ideology bangsa, rapuhnya struktur politik bangsa, semakin termarginalisasinya kebudayaan Indonesia oleh global culture, dan rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia.

Gagasan kebangkitan bangsa Muhaimin merangkum dua konteks sekaligus yaitu: pada konteks nasional dan internasional. Pada konteks nasional gagasan ini berusaha untuk melakukan restrukturisasi bangunan ekonomi politik bangsa demi menjamin kesejahteraan rakyat. Degradasi kultur politik bangsa mengakibatkan rapuhnya struktur kebangsaan kita sehingga

agenda utama peningkatan kesejahteraan warga menjadi terbengkalai. Agenda demokratisasi yang dijalankan sejak reformasi 1998 hanya berhasil pada level penataan demokrasi formal-prosedural tetapi tidak berkorelasi positif dengan kemakmuran rakyat. Oleh karenanya, Muhaimin menawarkan sebuah alternatif atas kebuntuan demokrasi liberal ini dengan cara melampauinya. Energi bangsa tidak boleh dihabiskan hanya untuk mewujudkan prosedur-prosedur demokratis, tetapi mengabaikan tujuan pokoknya. Sebagai bangsa, Kita tidak boleh terkurung dalam jebakan demokrasi. Sebab demokrasi tak lebih daripada sekedar instrument, bukan tujuan utama kita dalam berbangsa dan bernegara. Demokrasi harus kita lampau, sebab ia hanyalah alat, bukan tujuan. Tapi kita tidak boleh menciderainya apalagi membumi hanguskannya, karena ia adalah kerangka dasar kebangsaan kita. Sedangkan dalam konteks internasional cita-cita kebangkitan bangsa dimaknai sebagai eksistensi bangsa Indonesia tidak tergantung pada kekuatan ekonomi politik manapun. Indonesia mampu bangkit menjadi bangsa yang berdaulat, bermartabat dan mandiri. Hal ini didasarkan pada keprihatinan yang mendalam Muhaimin Iskandar atas relasi yang tidak seimbang, subordinatif, bahkan hegemonik antar Indonesia dengan Negara-negara maju dan lembaga-lembaga Internasional (IMF, WTO, World Bank, PBB dll). Indonesia tidak memiliki kemandirian dalam berhadapan dengan Negara-negara maju. Kondisi ini mengakibatkan kegagalan Indonesia melakukan proteksi atas kepentingan bangsanya.

Sebagai sebuah produk pemikiran politik, eksperimentasi pemikiran politik Muhaimin tidaklah berdiri sendiri. Akan tetapi, ia lahir dari sebuah

proses akumulatif dan dialektika dalam rangkaian historis. Gagasan Muhaimin bukanlah ilham yang serta merta turun dari langit atau dari alam kegelapan. Ia merupakan sebuah produksi pemikiran dari sebuah konteks historis tertentu yang terajut dari beragam tumpukan ide-ide sebelumnya. Oleh karenanya, gagasan ini memiliki relevansi terhadap kondisi paradok dan kebuntuan politik Indonesia kontemporer.

B. Saran – saran

Sebagai sebuah ijihad politik, gagasan politik Muhaimin Iskandar layak untuk diapresiasi dengan serius. Sebagai sebuah pemikiran, ia berusaha menawarkan sebuah alternative bagi kebangkrutan sistem politik bangsa. seperti apapun bentuknya, sangat tidak adil rasanya jika kita secara ceroboh menghakiminya. Biarlah waktu dan sejarah yang akan menjadi hakim paling adil atas gagasan politik ini. Seperti lazimnya suatu pemikiran baru, sebagaimana dikatakan oleh Schopenhauer, ia juga akan melalui tiga level tantangan, yaitu ditertawakan, dibantah habis-habisan, dan pada akhirnya diikuti dengan takdzim. Pemikiran politik ini memiliki arti yang sangat penting tidak hanya bagi aktivis politik, akan tetapi juga bagi kaum intelektual, pengkaji ilmu politik, dan khalayak umum.

Hasil penelitian ini masih jauh dari kata memadai untuk mengurai gagasan politik Muhaimin Iskandar secara utuh dan komprehensif, oleh karenanya penulis anjurkan kepada peneliti yang lain untuk terus melakukan kajian dan telaah yang lebih mendalam, sistematis, kritis, dan komprehensif.

Kepada para peneliti dan pengkaji yang ingin melanjutkan penelitian ini dalam bidang pemikiran politik Muhaimin Iskandar hendaknya menggunakan perspektif yang beragam untuk memperkaya wacana.

Dan bagi pembaca khalayak yang ingin tahu lebih jauh tentang pemikiran politik Muhaimin Iskandar, supaya tidak terjebak pada pemahaman yang salah dan dikotomis maka hendaknya untuk melakukan pembacaan yang seimbang dan proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Buku

- Abdul Aziz Dahlan (ed), dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Abegebriel, Maftuh, dkk. *Negara Tuhan; The Thematic Encyclopaedia*, Yogyakarta: SR-Ins, 2004.
- Alfian, *Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka 1992.
- Ali, Zaenal. *100 Orang Indonesia Paling Berpengaruh*, Jakarta: Narasi, 2008.
- Andreson, Ben *Revolusi Pemoeda*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988
- Antlov, Hans. *Pengantar dalam Buku: Grgorius Sahdan, Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto*, Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2004.
- Anton Baker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Aristoteles: "Politik" dalam Diana Revitch dan Abigail Thernstrom (ed.), *Demokrasi: Klasik dan Modern*, terj. Hermoyo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Arrighi, Giovanni dan Beverly J. Silver, *Chaos and Governance in the Modern World System*, Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 1999.
- Asshiddiqie, Jimly. *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konpress, 2005.
- Azhar, Muhammad. *Filsafat Politik; Perbandingan Antara Islam dan Barat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 1996.
- Barton, Greg. *Memahami Abdurrahman Wahid*, dalam Muh. Shaleh Isre (ed.), *Prisma Pemikiran Gus Dur*, cet. II, Yogyakarta: LKiS, 2000

- Bashri, Yanto dan Retno Suffatni (ed.), *Sejarah Tokoh Bangsa*, Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, LKiS, 2005
- BJ Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafiti Press, 1985.
- Budiardjo, Miriam. *Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- _____ *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2002.
- Dhakidae, Daniel. *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Diamond, Larry. *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Yogyakarta: IRE Press, 2003.
- Diana Revitch dan Abigail Thernstrom (ed.), *Demokrasi: Klasik dan Modern*, terj. Hermoyo, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Eep Saefulloh Fatah. *Masalah dan Prospek Demokrasi Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Feith, Herbert dan Lance Castles. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Fukuyama, Francis. *The End of History and the Last Man: Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*, Yogyakarta: Qalam, 2004.
- Furchan, Arief dan Agus Maimun. *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Gandhi, Leela. *Teori Poskolonial: Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat*, Yogyakarta: Qalam, 2001.
- Giddens, Anthony. *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern; Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim dan Marx Weber*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Guillermo O'Donnell dan Philippe C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, Jakarta: LP3ES, 1993.
- Hatta, Muhammad. *Demokrasi Kita*, Jakarta: Panji Masyarakat, 1960.
- _____ *Kumpulan Karangan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987.
- Heryanto, Ariel. *Perlawanan Dalam Kepatuhan*, Bandung: Mizan, 2000.
- Herbert Feith dan Lance Castles, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Hermawan, Eman. *Politik Membela Yang Benar: Teori, Kritik dan Nalar*, Yogyakarta: KLIK R dan DKN Garda Bangsa, 2001.
- _____. dkk. *Partai Advokasi; Wacana, Keberpihakan, dan Gerakan*, YogJakarta: KLiK R dan DPP PKB, 2004.
- _____. *Nalar Kekuasaan Kaum Pergerakan*, Yogyakarta, KLIK R, 2008.
- _____. *Politik Isu Tunggal: Jalan Buntu Gerakan Masyarakat Sipil*, KLIK R dan DKN Garda Bangsa, 2002.
- Huntington, Samuel. dkk. *Amerika dan Dunia*, Jakarta: Obor, 2005.
- Ida, Laode dan A. Thantowi Jauhari. *Gus Dur Diantara Keberhasilan dan Kenestapaan*, cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Iskandar, A. Muhaimin. *Masyarakat Indonesia Abad XXI*, Jakarta: PB PMII, 1996.
- _____. dan Muhammad Nastain, *Paradigma Arus Balik Masyarakat Pinggiran*, Jakarta: PB PMII, 1997.
- _____. *Manajemen Komunikasi Partai Kebangkitan Bangsa*, Jakarta: Pustaka Bumi Selamat, 2001.
- _____. *Membajak di Ladang Mesin: Simpang Kepentingan Buruh-Negara-Modal di Tengah Arus Kapitalisme Global*. Semarang, Yayasan Wahyu Sosial, 2004.
- _____. *Gus Dur yang Saya Kenal: Catatan Transisi Demokrasi Kita*, Yogyakarta: LKIS, 2004.
- _____. *Melampaui Demokrasi: Merawat Bangsa Dengan Visi Ulama*, Yogyakarta: Klik R, 2006.
- _____. *Spiritualitas Sepak Bola*, Jogjakarta, KLIK R, 2006

- I. Wibowo dan Francis Wahono (Ed.), *Neoliberalisme*, Yogyakarta, Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.
- Ismail Muhammad Syah dkk., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- James Petras dan Henry Veltmeyer, *Imperialisme Abad 21*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2001.
- Lewis, Bernard. *Islam Liberalisme Demokrasi: Membangun Sinerji Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Laode Ida dan A. Thantowi Jauhari, *Gus Dur Di antara Keberhasilan dan Kenestapaan*, cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Muhammad Abid al-Jabiri. *Syura: Tradisi-Partikularitas-Universalitas*, terj. Mujiburrahman. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Masdar, Umaruddin. *Gus Dur; Pecinta Ulama Sepanjang Zaman, Pembela Minoritas Entis-Keagamaan*, Yogyakarta; Klik R, 2005.
- _____ *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- _____ *Pemikiran Politik 9 Ulama Besar NU*, Jakarta: DPP PKB, 2008.
- MD, Moh. Mahfud. *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Mic Tarunan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Solo: Pustaka Sinar Harapan dan UNS Press, 1995.
- Mohamad, Goenawan. *Catatan Pinggir 5*, Jakarta: Grafiti, 2000.
- Ma'mun Murod Al-Brebesy, *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amin Rais tentang Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 1999.
- Noor, Deliar. *Mohammad Hatta: Biografi Politik*, Jakarta: LPE3S, 1990.
- Notosusanto, Nugroho. *Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Noor, Deliar. *Mohammad Hatta: Biografi Politik*, Jakarta: LPE3S, 1990.

- O'Donnell, Guillermo dan Philippe C. Schmitter. *Transisi Menuju Demokrasi Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, cet. I, Jakarta: LP3ES, 1993.
- Putra, Fadilla. *Partai Politik dan kebijakan Publik: Analisis Terhadap Konkruenasi janji Politik Partai dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Pramoedya Ananta Toer, *Rumah Kaca*, Jakarta: Hasta Mitra, 1988.
- Rahmat, Jalaluddin. *Antara Al-Farabi dan Khomeini; Filsafat Politik Islam*, Bandung: Mizan, 2002
- Sri Edi Swasono dan Fauzie Ridjal. *Mohammad Hatta: Beberapa Pokok Pikiran*, Jakarta: UI Press, 1992.
- Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik; Kajian Historis Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Soekarno. *Di Bawah Bendera Revolusi*, jilid I, Jakarta; Panitia Penerbit, 1964.
- Sudibyo. Agus, *Bung Karno; Analisis Berita Pers Orde Baru*, Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 1999
- Syam, Nur. *Kegagalan Mendekatkan Jarak Ideologi Partai Politik Pengalaman Indonesia Orde Baru*, Jurnal IAIN Sunan Ampel Edisi XVII, 1999.
- Sahdan, Gregorius. *Transisi Demokrasi Indonesia Pasca Soeharto*, Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2004.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada. 1996
- The Liang Gie. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia: Suatu Analisis tentang Masalah-masalah Desentralisasi dan Cara-cara Penyelesaiannya*, Jilid I, II, dan III, Jakarta: Gunung Agung, 1968.
- Taufiq, Wardi. *Bergerak Dengan Nalar Baru*, Jakarta: P3M, 2008.
- Uhlin, Anders. *Oposisi Berserak: Arus Deras Gelombang Demokratisasi di Indonesia*, Bandung: Mizan 1998.
- Wardi Taufiq dan Ade Indra Chaniago (ed.) *Sindrom Kuasa: Ancaman System Politik Demokrasi*, Jakarta, Democratic Institute, 2004.
- Wilopo. *Zaman Pemerintahan Partai-Partai*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1991.

Yamani. *Antara Al-Farabi dan Khomeini; Filsafat Politik Islam*, Bandung: Mizan, 2002.

Yanto Bashri dan Retno Suffatni (ed.), *Sejarah Tokoh Bangsa*, Yogyakarta; Pustaka Tokoh Bangsa, LKiS, 2005.

Kelompok Lainnya

Syam, Nur. *Kegagalan Mendekatkan Jarak Ideologi Partai Politik Pengalaman Indonesia Orde Baru*, Jurnal IAIN Sunan Ampel Surabaya Edisi XVII, 1999.

Wahid, Hasyim. “*Pergerakan Mahasiswa dan Konsensus Nasional Bangsa*”, Makalah, disampaikan pada Rakernas PB PMII, 2005.

Dokumentasi Hasil Muktamar II Partai Kebangkitan Bangsa Semarang, 16-19 April 2005, cet. II (Jakarta: DPP PKB, 2005) hlm. 80.

Wahid, Hasyim. *Indonesia dan Geopolitik Tripolar*. YogJakarta di Hotel Eden pada tanggal 21 Februari 2006.

<http://www.berpolitik.com> pada tanggal, 28 Mei 2008.

Wahid, KH. Abdurrahman. “*Demokrasi Dalam Pengertian Kita*,” <http://GusDur.net>, akses 19 September 2008.

_____ “*Esai Khusus Abdurrahman Wahid Masih Perluah Formalisme Agama?*” <http://GusDur.net>, akses 10 September 2008

_____ “*Agama dan Demokrasi*,” <http://GusDur.net>, akses 19 September 2008.

_____ “*Demokrasi Dalam Pengertian Kita*,” <http://GusDur.net>, akses 19 September 2008.

CURRICULUM VITAE

Nama : Abu Hanifah
Tempat/Tgl. Lahir : Probolinggo, 27 November 1981
Alamat Asal : Kelurahan Krajan Desa Sumber Dawe RT 09 / RW 02
Maron, Probolinggo Jawa Timur Tlp. 081227288531.

ORANG TUA

Ayah : M. Ma'shum Masri
Ibu : Muryatun Ustqo
Alamat : Kelurahan Krajan Desa Sumber Daweh RT 09 / RW 02
Maron, Probolinggo Jawa Timur

PENDIDIKAN

1. SDN. Sumber Dawe Probolinggo Lulus Tahun 1993
2. MTs NU Maron Probolinggo Lulus Tahun 1998
3. MA Zainul Hasan I Genggong. Probolinggo. Lulus Tahun 2001
4. Stara I (SI) Jurusan Aqidah Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Lulus Tahun.

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pengurus OSIS MTs NU Maron Probolinggo Tahun. 1997
2. Ketua OSIS MA Walisongo Gending Probolinggo Tahun. 1999
3. Ketua I IPNU PAC Maron Probolinggo Tahun. 2000
4. PMII Rayon Fakultas Ushuluddin Koordinator Pengkaderan Tahun. 2002-2003
5. PMII Komisariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Koordinator Pengkaderan Tahun. 2003-2004
6. PMII Cabang Yogyakarta Th. 2005-2007
7. PB PMII Biro Kajian Strategis Gerakan Periode 2008-2010
8. Presiden Partai Rakyat Merdeka (PRM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2003-2004
9. Menteri Luar Negeri DEMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2003-2005
10. Presiden Mahasiswa DEMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2005-2007
11. Deklator BEM NUSANTARA Tahun 2006
12. Koordinator Presidium Nasional Jong Nasional (JONG NAS) 2007-Sekarang
13. Kaum Muda Nahdlatul Ulama (KMNU) Korwil D.I.Yogyakarta Biro Jaringan dan Gerakan